

GOTONG ROYONG SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM PENANGANAN KEMISKINAN

MUTUAL HELP ACTIVITIES AS SOCIAL CAPITAL IN THE HANDLING OF POVERTY

Nunung Unayah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jln. Dewi Sartika No 200 Cawang III, Telp. 021-0817126, Jakarta Timur
E-mail: 16nunungunayah@gmail.com

Abstrak

Gotong royong merupakan nilai budaya masyarakat yang dimanfaatkan sebagai mekanisme dalam mengatasi berbagai permasalahan di tingkat lokal. Tulisan ini dimaksudkan untuk menggambarkan implementasi nilai-nilai gotong royong yang melembaga di masyarakat. Informasi dikumpulkan dari berbagai kepustakaan dan hasil penelitian program RUTILAHU. Penulis tertarik dan mengarahkan perhatian pada nilai gotong royong sebagai modal sosial yang dikaitkan dengan penanganan kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, bahwa gotong royong yang cukup efektif dalam penanganan kemiskinan, khususnya terkait dengan program RUTILAHU. Masih terlembaganya nilai gotong royong, sehingga program RUTILAHU dapat diimpelentasikan dengan baik, dalam arti sesuai dengan rencana dan target yang dicapai. Masyarakat di sekitar lokasi program secara sukarela menyumbangkan tenaga, bahan-bahan bangunan yang diperlukan dan bahan makanan, serta membantu secara bersama-sama mengerjakan rumah sampai selesai. Mereka tidak mendapatkan pengembalian dalam bentuk apapun atas tenaga, bahan bangunan, dan bahan makanan yang telah diberikan. Rumah yang dibangun dengan gotong royong tersebut tidak hanya dirasakan oleh penerima program, tetapi masyarakat sekitar merasa senang. Disimpulkan bahwa nilai-nilai budaya gotong royong merupakan modal sosial sebagai mekanisme penanganan kemiskinan.

Kata kunci: kemiskinan, gotong royong, modal sosial.

Abstract

Mutual cooperation is a kind of socially cultural value that is used as a mechanism to handle various social problems in the local level. This paper has intended to illustrate the implementation of the values of mutual cooperation institutionalized in a community. It is a kind of secondary research based on various data, especially in study of dwelling rehabilitation called as RUTILAHU program. Author has intended to describe several values of mutual cooperation as social capital associated with the handling of poverty. Based on the research literature, mutual cooperation is quite effective in addressing poverty, particularly in relation to RUTILAHU program. Since the cooperatives values are still institutionalized, RUTILAHU program can be implemented well in accordance with the plan and target achieved. Local residents have voluntarily supported the program by contributing in various ways both physically and materially. These contributions were completely free of charge. Not only beneficiaries, but also the local community can get the program's advantages. Author concludes that cultural values of mutual cooperation is mostly useful to overcome poverty problems, especially in dwelling rehabilitation.

Keywords: poverty, mutual cooperation, social capital.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih belum bisa dilepaskan dari masyarakat di Indonesia. Kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan orang dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan sosial. Kemudian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, mendefinisikan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks karena berkaitan dengan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan tali temali, yaitu sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan multidisiplin dan multisektor. Seperti yang dikatakan Suradi (2016), bahwa berbagai masalah sosial berakar dari kemiskinan. Maka dapat dikatakan, bahwa kemiskinan menjadi “Ibu” yang melahirkan masalah sosial lainnya. Kemudian kemiskinan itu bersifat multidimensi, karena menyangkut berbagai aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, mental spiritual, politik dan hukum. Aspek-aspek tersebut akan membentuk irisan-irisan dan berkelindan, sehingga menciptakan situasi yang sangat kompleks.

Badan Pusat Statistik merumuskan indikator kemiskinan dalam upaya menentukan suatu rumah tangga masuk ke dalam kategori miskin. Indikator tersebut, yaitu [1] Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang, [2] Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, [3] Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester, [4] Tidak memiliki fasilitas

buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain, [5] Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, [6] Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan, [7] Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/minyak tanah. [8] Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu, [9] Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. [10] Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari, [11] Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik, [12] sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan. [13] Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD, dan [14] Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Jika minimal sembilan variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2016 penduduk miskin Indonesia berjumlah 28,01 juta orang atau 10,86 persen. Berdasarkan Potret Rumah Tangga hasil Basis Data Terpadu (BDT) 2015 oleh BPS, dari survei terhadap 40 persen terendah, diperoleh data bahwa rumah yang rawan layak huni sebanyak 2,18 juta dan rumah yang tidak layak huni 0,33 juta, sehingga total Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 2,51 juta (BPS, 2016; Kemen PUPERA, 2016).

Rumah yang masuk kategori tidak layak huni tersebut dibangun dari bahan-bahan yang mudah rusak atau kualitas rendah. Kondisi di rumah tidak teratur, tidak ada pembagian ruang sesuai kebutuhan dan pada umumnya tidak dilengkapi dengan WC. Rumah tidak layak

huni di perkotaan digambarkan dengan rumah yang padat, lingkungannya jorok, kumuh, dan rawan sosial. Rumah-rumah tersebut pada umumnya dibangun dilahan ilegal, di bantaran sungai, kolong jalan layang, dan pinggiran rel kereta api (Suradi, 2006, 2012).

Perumahan merupakan dimensi kemiskinan yang paling nyata. Itulah sebabnya perumahan mewakili masalah yang bersifat di berbagai kota di dunia ketiga (Gilbert dan Gluger, 2007). Mikkelsen (2001) menetapkan sejumlah indikator dalam mengukur tingkat kemiskinan, dan yang pertama dalam indikator itu adalah rumah, yang mencakup aspek lantai, atap, dan jendela. Penjelasan tersebut di atas menegaskan, bahwa rumah merupakan kebutuhan yang penting, dan memerlukan pemenuhan terkait dengan taraf hidup, harkat dan martabat manusia.

Kemiskinan dipandang sebagai masalah sosial, dan sekaligus menjadi penyebab hadirnya masalah sosial lain. Berbagai masalah sosial yang berakar dari kemiskinan, seperti: anak telantar, anak jalanan, pekerja anak, anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual, perdagangan perempuan dan anak, prostitusi serta tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Berbagai masalah yang bersifat patologi sosial tidak dapat dilepaskan dengan kehadiran kemiskinan (Suradi, 2016).

Negara dan pemerintah telah menempatkan masalah kemiskinan sebagai isu strategis nasional. Artinya, bahwa kemiskinan merupakan salah satu agenda utama dan sasaran prioritas pembangunan nasional. Implikasinya, negara dan pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program anti kemiskinan yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga negara dengan dukungan anggaran yang cukup besar. Hal ini dikarenakan dari beberapa program kemiskinan

yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun lembaga lain non pemerintah masih belum berhasil dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, seperti: jalan tol, pelabuhan, terminal, bandar udara dan jalur kereta api oleh pemerintah, merupakan kebijakan dalam rangka pengurangan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, didistribusikannya skema bantuan sosial oleh kementerian dan lembaga negara bagi orang-orang miskin, dimaksudkan agar orang-orang miskin mampu meningkatkan pendapatannya, dan atau menurunkan pengeluaran, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan dan pelayanan sosial dasar.

Di samping program-program yang diluncurkan pemerintah, di tengah-tengah masyarakat ada mekanisme pemecahan masalah sosial, berbasis nilai-nilai budaya lokal. Nilai-nilai budaya tersebut dikenal dengan “Gotong Royong” (ciputrauceo.net, 2016; Koentjaraningrat, 1987). Berkaitan dengan gotong royong ini, berkembang isu bahwa dewasa ini gotong royong tersebut mengalami kemunduran sebagai akibat dari terjadinya perubahan sosial yang cepat. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mendeskripsikan nilai-nilai budaya gotong royong yang dikaitkan dengan penanganan kemiskinan pada program RUTILAHU. RUTILAHU merupakan akronim dari Rumah Tidak Layak Huni yang dipopulerkan oleh Menteri Sosial (baca: Khofifah Indar Parawansa). Sedangkan secara lengkap adalah Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH). RUTILAHU merupakan program Kementerian Sosial dalam bentuk bantuan stimulasi perbaikan rumah bagi keluarga miskin. Besarnya bantuan stimulasi tersebut Rp. 15 juta per keluarga miskin. Besarnya bantuan tersebut tentu tidak akan mencukupi untuk perbaiki rumah. Oleh karena itu, diharapkan ada partisipasi

masyarakat di lingkungan keluarga miskin tersebut.

Tulisan ini merupakan hasil penelusuran kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang praktik nilai-nilai gotong royong di masyarakat yang merupakan budaya bangsa. Kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah gotong royong dalam rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin.

PEMBAHASAN

1. Memahami Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang bersifat multidimensi, karena meliputi rendahnya tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan, kerawanan tempat tinggal dan pribadi serta ketidakberdayaan. Hal tersebut mengakibatkan penduduk miskin tinggal di pemukiman tidak layak huni, kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dasar dan kesempatan kerja. Kondisi ini sejalan yang dikemukakan oleh Soekanto (1982), bahwa kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Kemiskinan umumnya dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan (lingkup dimensi ekonomi) dan tidak terpenuhinya dari aspek sosial, lingkungan, keberdayaan, dan tingkat partisipasinya (lingkup dimensi non ekonomi). Mereka juga mempunyai pandangan dan ukuran tersendiri tentang kesejahteraan sosial bagi dirinya maupun keluarganya, sehingga penanganan kemiskinan perlu campur tangan semua pihak baik pemerintah pusat,

pemerintah daerah maupun masyarakat serta dunia usaha yang terkait dalam melakukan pengembangan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya (lihat Roebyantho, et.al.,2011).

Kemiskinan berkaitan dengan masalah deprivasi sosial, akses ke sumber daya seperti air, tempat tinggal, layanan kesehatan dan sanitasi, pendidikan serta transportasi. Kemiskinan menyebabkan ketergantungan, isolasi, ketidakberdayaan (*vulnerability*) dan rendahnya harapan hidup (Chambers, 1983). Kemiskinan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Dikemukakan oleh Nugroho (1995), bahwa kemiskinan merupakan persoalan *multi-dimensional* yang melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Berdasar pemikiran tersebut, maka rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar pada dimensi ekonomi penduduk miskin yang memerlukan pemenuhan.

2. Memaknai Gotong Royong

Masyarakat mengembangkan kekanisme sosial dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Mekanisme sosial yang dikembangkan masyarakat dalam bahasa umum disebut tolong menolong dan gotong royong. Berdasar sejarah, pada masyarakat Indonesia tumbuh dan terlembaga nilai tolong menolong dan gotong royong yang merupakan nilai-nilai dasar dalam pergaulan hidup. Nilai tolong menolong dan gotong royong ini sesuai dengan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjiwai setiap kegiatan pembangunan.

Istilah gotong royong berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti pikul atau angkat, sedangkan royong berarti bersama-sama. Sehingga jika diartikan secara harafiah, gotong royong berarti mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-

sama. Sedangkan menurut asal kata, gotong-royong berasal dari kata gotong yang berarti “bekerja”, dan royong yang berarti “bersama”. Gotong royong dapat dipahami pula sebagai bentuk partisipasi aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai positif dari setiap obyek, permasalahan, atau kebutuhan orang-orang di sekelilingnya. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa bantuan yang berwujud materi, keuangan, tenaga, fisik, mental spiritual, ketrampilan, sumbangan pikiran atau nasihat yang konstruktif, sampai hanya berdoa kepada Tuhan (lihat KBBI).

Koentjaraningrat (1964) mendefinisikan bahwa gotong-royong merupakan kerjasama di antara anggota-anggota suatu komunitas. Selanjutnya, budaya gotong royong dibedakan menjadi tolong menolong dan kerja bakti. Budaya tolong menolong terjadi pada aktivitas pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, kegiatan pesta, kegiatan perayaan, dan pada peristiwa bencana atau kematian. Sedangkan budaya kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, entah yang terjadi atas inisiatif warga atau gotong royong yang dipaksakan (Koentjaraningrat, 1987).

Kemudian gotong royong merupakan cita-cita tolong menolong rakyat Indonesia, seperti yang di ungkapkan oleh Hatta (1976) (dalam Merphin Panjaitan 2016), bahwa sanubari rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektiviteit. Kalau seseorang di desa hendak membuat rumah atau mengerjakan sawah ataupun ditimpa bala kematian, maka ia tak perlu membayar tukang atau menggaji kuli untuk menolongnya. Karena dia akan di tolong bersama-sama oleh warga desanya.

Gotong royong menyimpan berbagai nilai yang positif sebagai modal sosial bagi masyarakat terutama nilai kesetiakawanan

sosial. Nilai-nilai positif dalam gotong royong antara lain:

a. Kebersamaan

Gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Dengan gotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama.

b. Persatuan

Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Dengan persatuan yang ada, masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul.

c. Rela berkorban

Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, tenaga, pemikiran, hingga uang. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Masyarakat rela mengesampingkan kebutuhan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan bersama.

d. Tolong menolong

Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam gotong royong, selalu dapat memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain.

3. Gotong Royong sebagai Modal Sosial

Gotong royong merupakan perilaku sosial dalam suatu berkelompok atau komunitas, yang dilandasi oleh nilai sosial budaya, seperti solidaritas, kebersamaan, suka rela dan kerukunan. Berdasar pengertian itu, maka unsur-unsur di dalam gotong royong meliputi:

nilai, jaringan sosial dan perilaku sosial. Unsur-unsur tersebut dapat ditemukan di dalam konsep modal sosial. Sehubungan dengan itu, pembahasan mengenai gotong royong, juga berarti pembahasan tentang modal sosial.

Modal sosial merupakan hasil dari kerja sama, mengembangkan kepercayaan, dan membangun rangkaian sosial. Membangun modal sosial untuk menyusun lingkungan sosial yang kaya akan partisipasi dan peluang. Seperti suatu lingkungan yang memungkinkan pelaku untuk kerap bertemu, di mana berbagi nilai dan norma sosial dapat terus dipelihara. Hal ini lalu mendorong kemungkinan atas keberlanjutan interaksi berulang ke depan, kemudian mengurangi ketidakpastian dan memperkecil risiko (Ramstrom dalam Yustika, 2008).

Lubis (2006) mendefinisikan modal sosial, bahwa unsur-unsur pokok modal sosial mencakup 3 hal, yaitu: (1) Kepercayaan/*Trust* (kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, toleransi, dan kemurahan hati), (2) Jaringan sosial/*Social Networks* (partisipasi, respositas, solidaritas, kerjasama), dan (3) Pranata/*Institution*. Sementara itu Putnam (1993) menyatakan modal sosial sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*) dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama.

Selanjutnya Hasbullah (2006), menyatakan inti telaah modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerja sama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan, dan dibangun di atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika

didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan di atas prinsip-prinsip yang disepakati. Dalam upaya membangun sebuah bangsa yang kompetitif peranan modal sosial semakin penting. Banyak kontribusi modal sosial untuk kesuksesan suatu masyarakat. Dalam era informasi yang ditandai semakin berkurangnya kontak berhadapan muka (*face to face relationship*), maka modal sosial sebagai bagian dari modal maya (*virtual capital*) akan semakin menonjol perannya (lihat Ancok, 1998)

Berkaitan dengan modal sosial, Fukuyama (1999) berargumentasi, bahwa modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal sosial sebagai persyaratan bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas demokrasi. Di dalamnya merupakan komponen kultural bagi kehidupan masyarakat modern. Korupsi dan penyimpangan yang terjadi di berbagai belahan bumi dan terutama di negara-negara berkembang Asia, Afrika, dan Amerika Latin, salah satu determinan utamanya adalah rendahnya modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas dan menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Sementara itu, Ibrahim, (2006) menyatakan hakikat dari modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jaringan pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, termasuk nilai dan norma yang mendasari hubungan sosial tersebut. Sebagai makhluk sosial tidak ada individu yang hidup

sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu tidak ada satu masyarakat atau komunitas yang tidak memiliki modal sosial. Pola hubungan sosial inilah yang mendasari kegiatan bersama atau kegiatan kolektif antar warga masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tersebut mampu mengatasi masalah mereka bersama-sama.

4. Implementasi Gotong Royong

Perkembangan sosial budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat disinyalir akan menggerus nilai-nilai budaya yang selama ini sudah terlembaga secara turun temurun, salah satunya yang dikenal dengan gotong royong. Isu yang berkembang dewasa ini, bahwa terjadinya kemajuan di berbagai bidang kehidupan manusia, telah melunturkan gotong royong, dan sebaliknya semakin menguatkan nilai-nilai materialisme dan komersialisme. Ukuran yang digunakan pada setiap kegiatan sudah beralih pada materi atau uang, bukan kehidupan sosial yang saling bantu dan tanpa pamrih.

Apabila nilai-nilai materialisme dan komersialisme tersebut telah menggeser dan menggantikan nilai-nilai budaya gotong royong, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Orang mampu dengan sumber daya yang dimiliki, terutama materi atau uang, dapat menguasai sumber-sumber daya yang diinginkan, tanpa melihat kepentingan orang lain. Maka yang terjadi adalah cara hidup individualisme, di mana seseorang tidak lagi peduli atau setia kawan dengan kondisi orang lain di sekitarnya.

Sebaliknya, orang miskin akan terus terpeangkap di dalam lingkaran kemiskinannya dan tidak mungkin dapat keluar dari lingkaran kemiskinan itu. Maka yang terjadi pada orang miskin adalah lingkaran setan kemiskinan. Orang miskin itu tidak mampu membeli barang

kebutuhan dasar dan tidak mampu mengakses pelayanan sosial yang diperlukan, karena tidak memiliki uang yang cukup (Suradi, 2016).

Merespon isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait dengan nilai-nilai budaya gotong royong, berikut disajikan informasi yang menarik untuk memastikan bahwa gotong royong itu masih sangat diperlukan oleh masyarakat dalam semua struktur sosial. Kasus yang diuraikan dalam tulisan ini salah satu dari aktivitas masyarakat yang masih dilandasi oleh nilai-nilai budaya gotong royong. Aktivitas masyarakat dimaksud, yaitu rehab rumah bagi keluarga miskin di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan.

Rehab rumah di Kabupaten Enrekang merupakan program dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Kemiskinan. Program rehab rumah ini dikenal dengan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH), dan Menteri Sosial RI (baca: Khofifah Indar Parawansa) menggunakan terminologi RUTILAHU. Program RUTILAHU ini dengan sasaran keluarga miskin berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (Data Terpadu). Program ini merupakan program nasional untuk seluruh wilayah Indonesia, baik yang berada di wilayah perkotaan, perdesaan, perbatasan antar negara, daerah terpencil dan terluar.

Dari prosedur dan mekanisme tersebut, yang menarik untuk dipaparkan dalam tulisan ini adalah pelaksanaan rehab rumahnya. Hasil penelitian Sabarisman (2016) di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan membuktikan, bahwa nilai-nilai budaya gotong royong masih terlembaga dengan baik pada masyarakat di lokasi program RUTILAHU. Istilah gotong royong dalam bahasa Enrekang “Makkombong” masih menjadi tradisi masyarakat di Kabupaten

Enrekang. Kegiatan gotong royong atau “Makkombong” tersebut sudah dilakukan oleh warga masyarakat setempat sejak dulu, dan sudah merupakan bagian dalam kehidupan bermasyarakat Enrekang. Berkaitan dengan itu, ditegaskan oleh tokoh masyarakat setempat sebagaimana dikutip oleh Sabarisman (2016):

Bahwa di Desa Kalosi gotong royong (Enrekang) sesuai dengan nilai-nilai dan pengamalan Pancasila sila ke tiga yaitu Persatuan Indonesia. Pengamalan sila ke tiga dari Pancasila yang berupa gotong royong ini, tentunya tumbuh dari kita sendiri, kesadaran sendiri, dan perilaku individu sebagai warga masyarakat yang harus ditanamkan dan tidak ada pemaksaan.

Pernyataan yang disampaikan tokoh masyarakat tersebut menegaskan, bahwa manusia yang hidup di lingkungan masyarakat harus memiliki rasa saling memiliki dan membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga akan tumbuh rasa persatuan dan kesatuan, dan tumbuh rasa kebersamaan serta dalam pekerjaan akan cepat selesai dan ringan dalam menyelesaikan perbaikan rumah warga penerima bantuan. Hal ini juga sesuai dengan seruan dari Bupati Enrekang kepada masyarakatnya agar seluruh masyarakat di mana saja berada diharapkan tetap menjaga budaya *Massenrempulu* sebagai modal dasar pembangunan.

Khusus berkaitan dengan program RUTILAHU, bahwa perbaikan rumah keluarga miskin dilakukan secara bergotong royong, baik antar kelompok penerima program maupun dengan warga yang tidak menerima program. Hal ini sebagai gambaran, bahwa masyarakat di Enrekang mempunyai rasa kepedulian sosial dan tanggung jawab yang tinggi. Sebagaimana dikemukakan warga masyarakat yang dikutip oleh Sabarisman (2016), sebagai berikut:

Saya dengan warga yang lainnya sebetulnya tidak tahu ada program bantuan rehab rumah bagi keluarga miskin di lingkungan saya. Namun karena sudah niat saya untuk peduli sesama tetangga dan sikap toleran serta solidaritas antar warga dalam menjaga kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya menyumbangkan tenaga atau fisik saja dalam membantu tetangga, Ibu-ibu disini juga dengan tanpa disuruh atau dipaksa mereka mau dengan rela mau menyumbangkan makanan, ya seperti goreng pisang, kue-kue rumahan bikinan ibu-ibu atau panganan yang lainnya. Ooh iya, tentunya juga mereka menyediakan minuman untuk orang yang sedang bekerja dalam membangun rumah.

Mereka sendiri loh pakyang inisiatif dan biaya sendiri tanpa meminta sumbangan ke warga, akan tetapi mereka rela berkorban untuk memberikan sumbangan walaupun tidak besar, hanya berupa makanan. Kan itu juga makanan ada sebagian makanan olahan ngambil dari hasil kebun seperti, singkong, ubi dan pisang, yah begitulah pak masyarakat disini sudah dari dulu, sudah biasa dan sudah merupakan tradisi kebiasaan disini. Ooh Iya pak, ada juga warga yang mau menyumbangkan sebagian sisa kayu atau bahan bangunan yang tidak terpakai lagi untuk diberikan kepada tetangga yang membutuhkannya. Ya, seperti tetangga saya yang mendapat bantuan program RUTILAHU ini. Yang saya tahu pak, kan bantuan diberikan sepuluh juta yah. Ya kalau menurut saya sih untuk memperbaiki keseluruhan rumah ngga akan cukup pak.

Ya paling dinding yang rusak diganti, seng yang rusak juga diganti, apalagi kalau mengganti lantai atau dinding yang pakai kayu pak, berapa jumlah kayu yang harus kita beli belum lagi harganya mahal, Kan rumah disini pak, rumahnya tradisional, rumah panggung dan ukuran rumahnya besar-besar. Ya menurut

saya sih ngga akan cukup pak dengan bantuan uang sepuluh juta saja. Tapi ya bagaimana pak namanya juga bantuan yah diterima saja, dan mereka cukup senang dengan adanya bantuan rehab rumah ini. Dan yang terpenting juga pak, warga disini bisa ikut berpartisipasi membantu secara bergotong royong biar perbaikan rumahnya cepat selesai dan bisa mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh keluarga penerima bantuan.

Penuturan seorang penerima program tersebut, diperkuat dengan penuturan penerima program yang lain, sebagaimana dikutip oleh Sabarisman (2016) berikut: "Tapi alhamdulillah, bukan berapa besar jumlah bantuan yang diberikan pak, tapi rasa kepedulian sosial dan kebersamaan antar warga yang turut serta dalam membangun atau memperbaiki rumah tetangga yang sudah tidak layak huni. Kami senang pak, sudah bisa membantu tetangga, walaupun hanya bisa memberikan atau menyumbangkan tenaga dan makanan. Yang terpenting rasa kebersamaan yang kita jaga biar hidup rukun pak".

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa Makkombong (gotong royong) masih terlembaga dengan baik di Enrekang, dan mewarnai setiap aktivitas sosial masyarakat. Pada program RUTILAHU, praktik Makkombong telah terlihat hasilnya secara nyata. Masyarakat yang tinggal di lingkungan program RUTILAHU secara sukarela membantu keluarga miskin memperbaiki rumahnya. Hal ini juga menunjukkan, bahwa program RUTILAHU telah mendorong partisipasi sosial masyarakat.

PENUTUP

Nilai gotong royong masih terlembaga dengan kuat di masyarakat Enrekang. Keluarga miskin yang menerima program RUTILAHU ketika merahab rumahnya memperoleh dukungan dan bantuan dari warga di sekitarnya

dalam bentuk tenaga, bahan bangunan, dan bahan makanan. Dukungan dan bantuan dari warga di sekitar tersebut akan sangat membantu dan meringankan beban, mengingat bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp. 10 juta. Keterlibatan warga tersebut merupakan bentuk partisipasi sosial masyarakat.

Berdasarkan pengalaman program RUTILAHU Enrekang, maka sebaiknya program-program yang diluncurkan pemerintah didesain dengan konsep partisipasi sosial masyarakat. Karena program yang melibatkan masyarakat, akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat akan ikut bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djameludin. (2003). Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat, *PSIKOLOGIKA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Volume 8, No. 15. Desember 12, 2016. <http://jurnal.uii.ac.id/index.php/Psikologika/article/view/317>.
- Anonim. (2016, Februari 15). *Gotong Royong dan Manfaat bagi Kehidupan*, Jakarta. Diakses dari <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/15/gotong-royong-dan-manfaat-gotong-royong-bagi-kehidupan-ciputrauceo.com>.
- Badan Pusat Statistik. (2016, Januari 4). Persentasi Penduduk Miskin Maret 2016 mencapai 10,86 Persen, <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229/>.
- Chambers, Robert. (1983). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Fukuyama, Francis. (1999). *The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Gilbert, Alan dan Josef Gluger. (2007). *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga* (Anshori

- dan Juanda: penterjemah), Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hasbullah, Jousairi. (2006). *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press.
- Ibrahim, L. D. (2006). Memanfaatkan Modal Sosial Komunitas Lokal Dalam Program Kepedulian Korporasi. *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG*. Vol.1.No. 2.
- KBBI, (2017). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Gotong Royong, kbbi.web.id, di unggah tanggal 12 Januari 2017.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016, Januari 2). Rumah Tidak Layak Huni Berkurang 890.000 Unit, <http://www.pu.go.id/main/view/11184/> diunduh.
- Koentjaraningrat. (1964). *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- (1987). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lubis, Zulkifli B. (13 Juli, 2006). Potensi Sosial Budaya Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Sumatera Utara, Medan, Universitas Sumatera Utara. (Sebagai Bahan Pengantar Pada “Forum Diskusi Percepatan Pembangunan Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Masyarakat Multikultural Di Sumatera Utara).
- Merphin Panjaitan. (2016). *Peradaban Gotong Royong*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Mikkelsen, Birtha. (2001). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan*. (Mathias Nalle: penerjemah), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nugroho, Heru. (1995). *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan, dalam Awan Setya Dewanta dkk (eds.), Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Putnam, Robert D. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect* 13 (Spring): 35-42.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Roebyantho, Haryati, et.al. (2011). *Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE*. Jakarta: P3KS Press.
- Sabarisman, Muslim. (2016). *Laporan Penelitian Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan*. Tidak di Terbitkan.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suradi. (2016). *Mengurangi Simpul-Simpul KEMISKINAN, Memahami Anatomi Kemiskinan dan Pemberdayaan*. Jakarta: UMJ Press.
- Suradi, L. (2006). *Kemiskinan dan Politik Pembangunan Sosial*. Yogyakarta: Media Citra Press.
- Suradi, et.al. (2012). *Penanganan Kemiskinan di Perkotaan: Studi Evaluasi Program Rehalitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Perkotaan*, Jakarta: P3KS Press.
- (2016). *Mengurai Simpul-Simpul Kemiskinan: Memahami Anatomi Kemiskinan dan Pemberdayaan*. Jakarta: UMJ Press.
- Yustika, Ahmad Erani. (2008). *Ekonomi Kelembagaan, dalam Definisi, Teori dan Strategi*. Malang: Banyumedia Publishing.